

INOVASI MANAJEMEN PENDIDIKAN INKLUSIF: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW TERHADAP STRATEGI PENGELOLAAN LAYANAN PESERTA DIDIK BERKEBUTUHAN KHUSUS PERIODE 2015-2024

Zulfiana Dessyka Putri¹, Emilda Sulasmi²

¹Universitas Karimun¹

²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara²

Email : zulfianadessykaputri@gmail.com¹, emilda@umsu.ac.id²

Abstrak

Pendidikan inklusif menuntut adanya perubahan dari sekadar perluasan akses menjadi penataan layanan yang responsif terhadap keragaman kebutuhan peserta didik. Kajian ini bertujuan mengidentifikasi tren penelitian, strategi inovatif, dan relevansi temuan global terhadap manajemen pendidikan inklusif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan berupa Systematic Literature Review (SLR) dengan protokol PRISMA 2020. Literatur pada penelitian diperoleh dari Google Scholar, Scopus, ERIC, dan Garuda dengan rentang publikasi dari tahun 2015 hingga tahun 2024, melalui proses identifikasi, skrining, kelayakan, dan inklusi, ditemukan 23 artikel yang dianalisis secara tematik. Hasil kajian menunjukkan bahwa tema dominan meliputi manajemen sumber daya manusia, manajemen sistem dan kebijakan, kolaborasi multipihak, kurikulum adaptif, pemanfaatan teknologi asistif, dan evaluasi mutu layanan. Strategi yang paling menonjol ialah pelatihan reflektif bagi guru, pengembangan Individual Education Program (IEP) berbasis data digital, kemitraan lintas pemangku kepentingan, serta integrasi teknologi asistif dalam pembelajaran. Di Indonesia, temuan global tersebut belum terimplementasi secara optimal karena kendala koordinasi, keterbatasan guru pendidikan khusus, dan evaluasi yang masih administratif. Kajian ini menegaskan bahwa transformasi pendidikan inklusif memerlukan penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas guru, serta sistem layanan yang kolaboratif dan berbasis kebutuhan individual.

Kata kunci: pendidikan inklusif; manajemen pendidikan; peserta didik berkebutuhan khusus; systematic literature review; PRISMA.

Abstract

Inclusive education requires a shift from mere access expansion toward a more responsive service management for students with special needs. This study aims to identify research trends, innovative strategies, and the relevance of global findings to inclusive education management in Indonesia. The research employed a Systematic Literature Review (SLR) using the PRISMA 2020 protocol. Literature was retrieved from Google Scholar, Scopus, ERIC, and Garuda for publications issued between 2015 and 2024. After identification, screening, eligibility assessment, and inclusion, 23 articles were analyzed thematically. The findings show that dominant themes include human resource management, system and policy management, multi-stakeholder collaboration, adaptive curriculum, assistive technology, and service quality evaluation. The most prominent strategies are reflective teacher training, data-based digital Individual Education Programs (IEPs), cross-stakeholder partnerships, and the integration of assistive technology in learning. In Indonesia, these global practices are not yet implemented optimally due to coordination problems, limited special education teachers, and administrative evaluation practices. The study confirms that inclusive education transformation requires stronger governance, teacher capacity building, and collaborative, needs-based service systems.

Keywords: inclusive education; education management; students with special needs; systematic literature review; PRISMA.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan inklusif semakin diakui bukan hanya sebagai kebijakan yang mengintegrasikan peserta didik dengan kebutuhan khusus ke dalam pengaturan pendidikan arus utama. Di luar ini, inklusi mewakili komitmen mendalam terhadap hak asasi manusia, mengharuskan kerangka pendidikan dilengkapi untuk memastikan akses yang adil, partisipasi aktif, dan hasil pembelajaran yang seragam untuk semua siswa. Dalam konteks inisiatif global, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menggarisbawahi pentingnya pendidikan inklusif dan berkualitas tinggi sebagai tujuan penting, sementara Undang-Undang No. 20 tahun 2003 yang berkaitan dengan Sistem Pendidikan Nasional menegaskan kembali bahwa setiap individu berhak menerima pendidikan tanpa diskriminasi.

Dalam konteks Pendidikan di Indonesia, dedikasi terhadap pendidikan inklusif didukung oleh banyak kerangka peraturan, terutama Permendignus No. 70 tahun 2009, di samping kebijakan berkelanjutan yang menggarisbawahi perlunya akomodasi yang memadai, layanan pendukung, dan peningkatan kapasitas organisasi unit pendidikan inklusif. Meskipun demikian, selama fase implementasi praktis, perbedaan yang signifikan diidentifikasi antara tingkat pencapaian administrasi dan kualitas layanan yang diberikan. Banyak sekolah telah membuka kelas inklusi sesuai peraturan No 70 tahun 2009 dan telah menerima peserta didik berkebutuhan khusus, tetapi belum mampu menyediakan pembelajaran yang terdiferensiasi, lingkungan yang aksesibel, dan sistem dukungan yang memadai. (Wahyuni et al., 2021; Pratiwi & Hartini, 2023; Hadis & Nurhayati, 2023; Setyawan & Munawir, 2023).

Kondisi tersebut sering melahirkan apa yang dapat disebut sebagai inklusi semu. Secara fisik, peserta didik berkebutuhan khusus memang sudah berada di kelas reguler, tetapi secara pedagogis dan sosial mereka belum tentu benar-benar terlibat secara bermakna. Kurikulum yang masih seragam, pengelolaan kelas yang belum cukup adaptif, keterbatasan guru pendamping khusus, serta penilaian belajar yang belum fleksibel membuat inklusi kerap berhenti pada tahap akses saja, belum sampai pada keterlibatan aktif dan perkembangan yang optimal.

Tantangan utama yang terkait dengan pendidikan inklusif terletak bukan hanya pada keberadaan kerangka kerja peraturan, tetapi dalam pelaksanaan manajemen layanan. Administrasi pendidikan inklusif memerlukan koordinasi yang cangguh dari berbagai komponen: identifikasi persyaratan pelajar individu, perumusan kerangka kurikuler adaptif, penyediaan teknologi bantu, peningkatan kompetensi pendidik, kolaborasi dengan orang tua dan spesialis, dan implementasi penilaian berdasarkan informasi data. Dengan tidak adanya manajemen sistematis dari komponen-komponen ini, lembaga pendidikan inklusif dapat berubah menjadi pusat penempatan administratif belaka, daripada membina lingkungan belajar humanistic bagi peserta didik inklusi.

Banyak penelitian ilmiah telah mengeksplorasi pendidikan inklusif melalui lensa pedagogi, kebijakan, dan pengalaman peserta didik, akan tetapi kajian yang secara khusus menyintesis inovasi manajemen layanan peserta didik berkebutuhan khusus secara sistematis masih terbatas, terutama dalam konteks Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini melakukan Systematic Literature Review (SLR) dengan protokol PRISMA untuk memetakan tren penelitian, menelaah strategi inovatif, serta merumuskan implikasi praktis bagi manajemen pendidikan inklusif di Indonesia. (Ainscow & Messiou, 2018; Hehir et al., 2016; Messiou, 2017; Walton, 2018).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga

pertanyaan penelitian berikut: (1) apa tren inovasi manajemen pendidikan inklusif dalam literatur periode 2015–2024; (2) strategi manajemen inovatif apa yang terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas layanan PDBK; dan (3) bagaimana relevansi temuan literatur global terhadap konteks manajemen pendidikan inklusif di Indonesia.

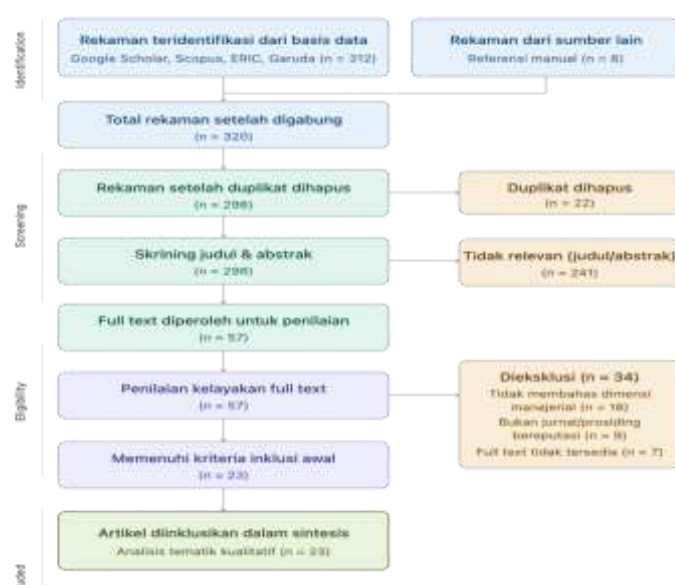
2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi Tinjauan Literatur Sistematis (SLR) yang mengikuti pedoman PRISMA 2020 (Item Pelaporan Pilihan untuk Tinjauan Sistematis dan Meta- Analisis). Metodologi ini dipilih karena penyediaannya untuk penelusuran, seleksi, dan sintesis literatur yang sistematis, transparan, dan dapat direproduksi. SLR berdasarkan PRISMA juga berkontribusi untuk mengurangi bias seleksi dan meningkatkan keandalan hasil. (Page dkk., 2021).

Pencarian literatur dilakukan di empat database utama: Google Scholar, Scopus, ERIC, dan Garuda. Kata kunci yang digunakan meliputi kombinasi istilah "inclusive education", "pendidikan inklusif", "management innovation", "inovasi manajemen", "special needs", "berkebutuhan khusus", dan "PDBK" dengan operator Boolean AND/OR untuk memperluas sekaligus mempertajam hasil pencarian.

Kriteria inklusi meliputi: artikel diterbitkan pada periode 2015–2024; membahas pendidikan inklusif, manajemen pendidikan inklusif, atau layanan peserta didik berkebutuhan khusus; berbentuk artikel jurnal ilmiah atau prosiding bereputasi; tersedia full text; serta ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kriteria eksklusi meliputi artikel duplikat, artikel opini tanpa dasar penelitian, publikasi yang tidak relevan dengan pendidikan formal, dan artikel yang tidak membahas dimensi manajerial.

Pemilihan artikel dilakukan melalui empat fase PRISMA: identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi. Selama fase identifikasi, artikel dikumpulkan dari database. Pada fase penyaringan, artikel duplikat dan tidak relevan dihapus berdasarkan judul dan abstraknya. Pada tahap kelayakan, teks lengkap ditinjau untuk mengevaluasi keselarasannya dengan fokus penelitian. Pada tahap akhir, artikel yang memenuhi semua kriteria dimasukkan dalam sintesis.



Gambar 1. Diagram alur seleksi literatur berdasarkan protokol PRISMA 2020.

Analisis data dilakukan melalui content analysis dan thematic analysis. Content analysis digunakan untuk mengidentifikasi fokus kajian, kecenderungan topik, dan pola umum dari

setiap artikel. Thematic analysis digunakan untuk mengelompokkan hasil ke dalam tema besar, seperti manajemen sumber daya manusia, kurikulum adaptif, teknologi asistif, kolaborasi multipihak, dan evaluasi mutu layanan. Untuk menjaga validitas, seluruh proses seleksi dicatat secara sistematis dan temuan antarstudi dibandingkan secara berulang. Penilaian kualitas artikel dilakukan secara ringkas menggunakan checklist CASP (Critical Appraisal Skills Programme) untuk menilai kejelasan tujuan, kesesuaian metode, ketepatan analisis, dan kekuatan temuan. Artikel dengan kualitas metodologis yang memadai dipertahankan untuk sintesis akhir.

Tabel 1. Pertanyaan Penelitian dan Fokus Analisis

Kode	Pertanyaan Penelitian
RQ1	Apa tren inovasi manajemen pendidikan inklusif dalam literatur 2015–2024?
RQ2	Strategi manajemen inovatif apa yang efektif meningkatkan kualitas layanan PDBK?
RQ3	Bagaimana relevansi temuan global terhadap konteks Indonesia?

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Diagram alur seleksi literatur protokol PRISMA, sebanyak 23 artikel memenuhi seluruh kriteria inklusi dan kemudian dianalisis secara tematik. Artikel-artikel tersebut mewakili konteks global dan nasional, sehingga memungkinkan perbandingan antara temuan praktik internasional dan realitas manajemen pendidikan inklusif di Indonesia. Secara umum, literatur terbaru memperlihatkan pergeseran makna pendidikan inklusif: bukan lagi sekadar menempatkan peserta didik berkebutuhan khusus di kelas reguler, melainkan sebuah proses sistemik untuk menghilangkan hambatan belajar, memperluas partisipasi, dan menumbuhkan rasa memiliki di lingkungan sekolah. Pada tataran kebijakan, arah ini tampak dari penekanan terhadap akomodasi yang layak, dukungan layanan, dan pengelolaan yang berbasis kebutuhan individual.hanya saja pada saat pelaksanaan implementasi dilapangan, antara kebijakan dan praktek masih terdapat gap yang sangat besar.

Temuan-temuan studi yang dianalisis menegaskan bahwa tantangan terbesar pendidikan inklusif di Indonesia bukan terutama pada akses formal, melainkan pada kualitas tata kelola layanan. Kajian tentang implementasi kebijakan menunjukkan lemahnya koordinasi antarpemangku kepentingan, ketidaksiapan sekolah dalam mengelola kelas inklusif, serta kecenderungan sekolah menolak peserta didik berkebutuhan khusus karena keterbatasan sumber daya. Ini memperkuat dugaan bahwa yang terjadi adalah inklusi parsial: peserta didik hadir secara fisik, tetapi belum sepenuhnya berpartisipasi secara akademik dan sosial. (Wahyuni et al., 2021; Pratiwi & Hartini, 2023; Hadis & Nurhayati, 2023; Setyawan & Munawir, 2023).

Dari perspektif peserta didik, inklusi akan bermakna ketika kehadiran di kelas menghasilkan pengalaman belajar yang setara, dukungan sosial yang sehat, serta rasa aman dan dihargai. Sejumlah studi menunjukkan bahwa siswa mengakui manfaat positif dari dukungan guru dan teman sebaya, tetapi masih terdapat persepsi negatif dan pengalaman marginalisasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa sekolah inklusif masih perlu memperkuat budaya sekolah, iklim kelas, dan pengelolaan relasi sosial antarpeserta didik agar benar-benar terasa ramah dan mendukung semua peserta didik.(Ainscow & Messiou, 2018; Messiou, 2017).

2.1 Tren Dominan Penelitian

Analisis terhadap 23 artikel menunjukkan bahwa tema yang paling menonjol adalah manajemen sumber daya manusia, disusun oleh manajemen sistem dan kebijakan. Dominasi

kedua tema ini menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif sangat bergantung pada kesiapan para pelaksana di lapangan dan pada kerangka tata kelola yang mendukungnya. Dengan kata lain, regulasi yang kuat tidak akan efektif tanpa guru yang kompeten, kepemimpinan sekolah yang adaptif, serta sistem dukungan yang jelas. (Sharma & Salend, 2019; Kurniawati et al., 2021; Sari & Purnama, 2022; Subban & Mahlo, 2021).

Selain itu, tema kolaborasi multipihak, kurikulum adaptif, teknologi asistif, dan evaluasi mutu layanan juga muncul secara konsisten. Keenam tema ini memperlihatkan bahwa inovasi dalam manajemen pendidikan inklusif bersifat multidimensi tidak dapat diselesaikan melalui satu intervensi tunggal, melainkan harus dipahami sebagai sistem layanan yang saling terhubung (Forlin et al., 2019; Lakkala et al., 2021; Booth & Ainscow, 2016).

Tabel 2. Ringkasan Tema Tematik Utama

Tema	Bentuk Inovasi	Implikasi
Manajemen SDM	Pelatihan reflektif, komunitas belajar profesional, supervisi klinis	Meningkatkan kompetensi guru reguler dan GPK
Manajemen IEP	IEP berbasis data digital dan kolaboratif	Layanan individual lebih konsisten dan terukur
Kolaborasi multipihak	Kemitraan sekolah, keluarga, tenaga ahli, dan komunitas	Dukungan layanan menjadi lebih berkelanjutan
Teknologi asistif	Integrasi perangkat asistif dan platform digital	Partisipasi dan keterlibatan belajar meningkat
Kurikulum adaptif	Diferensiasi tujuan, materi, metode, dan asesmen	Pembelajaran lebih responsif terhadap kebutuhan individual
Evaluasi mutu	Instrumen evaluasi berbasis layanan dan hasil belajar	Penilaian tidak berhenti pada aspek administratif

2.2 Strategi Inovatif Pengelolaan Layanan PDBK

Pertama, inovasi manajemen sumber daya manusia muncul sebagai strategi paling mendasar. Kajian mengenai pelatihan guru, komunitas belajar profesional, dan supervisi klinis menunjukkan bahwa kualitas layanan inklusif sangat ditentukan oleh kesiapan pendidik. Guru yang memiliki persepsi positif terhadap inklusi pun tetap memerlukan dukungan kompetensi agar mampu menerjemahkan prinsip inklusif ke dalam praktik kelas yang nyata. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas guru reguler maupun guru pendidikan khusus harus diposisikan sebagai prioritas utama (Sharma & Salend, 2019; Kurniawati et al., 2021; Florian & Camedda, 2020; Subban & Mahlo, 2021).

Kedua, pengelolaan *Individual Education Program* (IEP) menjadi instrumen penting dalam memberikan layanan individual bagi peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK). IEP berbasis data digital memungkinkan pencatatan kebutuhan belajar, target capaian, strategi intervensi, dan perkembangan peserta didik dilakukan secara lebih akurat. Dalam konteks ini, IEP sebaiknya tidak dipandang sekadar sebagai dokumen administratif, melainkan sebagai alat manajerial yang hidup, dinamis, dan dikerjakan secara kolaboratif oleh guru, kepala sekolah, orang tua, dan tenaga ahli (Aziz & Mahmud, 2020; Pratiwi & Hartini, 2023).

Ketiga, manajemen kolaborasi multipihak menjadi kunci keberlanjutan layanan inklusif. Pendidikan inklusif tidak akan berhasil jika sekolah bekerja secara terisolasi. Diperlukan jejaring yang menghubungkan guru, kepala sekolah, orang tua, konselor, terapis, komunitas, dan pemerintah daerah. Melalui kolaborasi ini, kebutuhan akademik, sosial, dan emosional peserta didik dapat ditangani secara lebih konsisten oleh seluruh pihak yang terlibat (Forlin et

al., 2019; Lakkala et al., 2021; Messiou, 2017; Booth & Ainscow, 2016).

Keempat, pemanfaatan teknologi asistif dan platform digital membuka peluang baru bagi peningkatan partisipasi PDBK dalam pembelajaran. Teknologi dapat membantu komunikasi, memperluas akses terhadap materi, menyederhanakan tugas, dan mendukung proses asesmen. Meski demikian, literatur menunjukkan bahwa pemanfaatannya di Indonesia masih belum optimal, sehingga penerapannya perlu ditopang oleh kesiapan infrastruktur, pelatihan guru, dan kebijakan sekolah yang memadai (Lancaster & Bain, 2019; Rasmitadila et al., 2022).

Kelima, kurikulum adaptif dan diferensiasi pembelajaran menjadi hal yang sangat penting agar peserta didik tidak terikat pada satu standar yang seragam. Kurikulum inklusif perlu memberi ruang bagi perbedaan tujuan, metode, media, dan bentuk asesmen sesuai kebutuhan masing-masing peserta didik. Dengan cara ini, keberagaman tidak lagi dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai landasan dalam merancang pembelajaran yang lebih bermakna (Florian & Camedda, 2020; Hehir et al., 2016).

Keenam, evaluasi mutu layanan perlu diarahkan dari sekadar pemenuhan administratif menuju perbaikan yang berkelanjutan. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sebaiknya memiliki indikator mutu yang benar-benar mencerminkan pengalaman belajar, tingkat partisipasi, perkembangan sosial-emosional, serta kepuasan para pemangku kepentingan — bukan sekadar menghitung jumlah peserta didik atau kelengkapan dokumen (Setyawan & Munawir, 2023; Hadis & Nurhayati, 2023).

2.3 Relevansi Temuan terhadap Konteks Indonesia

Sintesis wacana sastra global memberikan konsekuensi strategis yang signifikan bagi Indonesia. Di satu sisi, kerangka peraturan nasional telah berkembang menuju fokus yang lebih operasional, menekankan perlunya akomodasi yang memadai, layanan pendukung, peningkatan infrastruktur, dan pemantauan sistematis. Sebaliknya, pelaksanaan kebijakan ini di tingkat kelembagaan terus bergulat dengan tantangan terkait kapasitas, koordinasi, dan budaya organisasi yang berlaku. (UNESCO, 2020; Walton, 2018).

Penelitian internasional membuktikan bahwa Program Pendidikan Individual berbasis data (IEP) secara substansif meningkatkan layanan yang dipersonalisasi; namun, dalam konteks Indonesia, implementasinya tetap tidak optimal. Ini menggarisbawahi keharusan untuk digitalisasi IEP di samping fortifikasi protokol layanan di dalam lembaga pendidikan. Demikian juga, kolaborasi multistakeholder yang dianggap penting untuk keberhasilan di tingkat global memerlukan penerjemahan ke dalam mekanisme koordinasi yang berbeda di tingkat unit regional dan pendidikan. (Aziz & Mahmud, 2020; Pratiwi & Hartini, 2023). Kondisi minimnya guru pendidikan khusus bersertifikat dan belum optimalnya penggunaan teknologi asistif menunjukkan bahwa reformasi manajerial harus menyentuh aspek pengembangan sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur, dan supervisi mutu. Evaluasi program juga perlu dibangun ulang agar fokus pada mutu layanan kepada PDBK, bukan hanya kepatuhan administratif. (Sari & Purnama, 2022; Rasmitadila et al., 2022; Kurniawati et al., 2021).

Oleh karena itu, kesenjangan paling signifikan dalam pendidikan inklusif di Indonesia bukan terletak pada ketiadaan kebijakan, melainkan pada lemahnya implementasi kebijakan tersebut ke dalam praktik organisasi yang koheren. Membangun sekolah inklusif yang efektif memerlukan kepemimpinan transformasional, kerangka operasional yang terstruktur, dan budaya kolaboratif agar inklusi tidak berhenti pada pengakuan formal semata, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik (Wahyuni et al., 2021; Hadis & Nurhayati, 2023; Setyawan & Munawir, 2023). Temuan ini juga sejalan dengan literatur manajemen perubahan yang menekankan pentingnya pengelolaan resistensi secara sistematis dalam mendorong reformasi inklusif di tingkat kelembagaan (Erten & Savage, 2019).

Berdasarkan keseluruhan temuan, dapat disimpulkan bahwa inovasi manajemen pendidikan inklusif yang paling relevan untuk Indonesia adalah model yang adaptif, kolaboratif, berbasis data, dan berorientasi pada kebutuhan individual peserta didik. Model ini lebih berpeluang mengubah sekolah inklusif dari sekadar wadah administratif menjadi ekosistem pembelajaran yang autentik dan humanistik. (Booth & Ainscow, 2016; UNESCO, 2020).

4. KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa inovasi manajemen pendidikan inklusif dalam literatur 2015– 2024 bergerak ke arah tata kelola yang lebih sistemik, kolaboratif, dan responsif terhadap kebutuhan individual peserta didik berkebutuhan khusus. Tema dominan yang muncul adalah manajemen sumber daya manusia, manajemen sistem dan kebijakan, kolaborasi multipihak, kurikulum adaptif, teknologi asistif, serta evaluasi mutu layanan. Strategi-strategi unggulan yang teridentifikasi mencakup pelatihan pedagogis reflektif bagi pendidik, penyusunan *Individual Education Program* (IEP) berbasis data digital, penguatan kemitraan kolaboratif antarpemangku kepentingan, serta integrasi teknologi asistif dalam layanan pendidikan. Secara keseluruhan, strategi-strategi ini saling memperkuat dan membentuk ekosistem manajemen inklusif yang kokoh.

Dalam konteks Indonesia, temuan global tersebut belum sepenuhnya terimplementasi akibat keterbatasan koordinasi, minimnya guru pendidikan khusus bersertifikat, belum optimalnya digitalisasi layanan, serta evaluasi yang masih administratif. Oleh karena itu, transformasi pendidikan inklusif memerlukan penguatan tata kelola, peningkatan kompetensi guru, dan pembangunan sistem layanan yang kolaboratif, berbasis data, serta berorientasi pada mutu pengalaman belajar peserta didik. Hal ini juga berdampak pada transisi pasca-sekolah, karena dukungan layanan berkelanjutan menjadi penentu hasil jangka panjang peserta didik berkebutuhan khusus (Timmons et al., 2020).

DAFTAR PUSTAKA

- Ainscow, M., & Messiou, K. (2018). Engaging with the views of students to promote inclusion in education. *Journal of Educational Change*, 19(1), 1–17. <https://doi.org/10.1007/s10833-017-9312-1>
- Booth, T., & Ainscow, M. (2016). *Index for inclusion: Developing learning and participation in schools* (4th ed.). Centre for Studies on Inclusive Education.
- Erten, O., & Savage, R. S. (2019). Inclusive education reform in Turkey: Addressing resistance through change management. *International Journal of Inclusive Education*, 23(3), 250–265.
- Florian, L., & Camedda, D. (2020). Enhancing teacher education for inclusion. *European Journal of Special Needs Education*, 35(3), 311–320. <https://doi.org/10.1080/02619768.2020.1707579>
- Forlin, C., Chambers, D., Loreman, T., Deppeler, J., & Sharma, U. (2019). *Inclusive education for students with disability: A review of the best evidence in relation to theory and practice*. Australian Research Alliance for Children & Youth.
- Hadis, A., & Nurhayati, B. (2023). Mutu sekolah penyelenggara pendidikan inklusif: Analisis kesenjangan akreditasi dan layanan PDBK. *Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia*, 14(1), 22–35.
- Hehir, T., Grindal, T., Freeman, B., Lamoreau, R., Borquaye, Y., & Burke, S. (2016). *A summary of the evidence on inclusive education*. Abt Associates.
- Kurniawati, F., de Boer, A. A., Minnaert, A. E. M. G., & Mangunsong, F. (2021). Evaluating the effect of a training program on attitudes of primary school teachers towards

- inclusive education in Indonesia. *Teaching and Teacher Education*, 108, 103511.
- Lakkala, S., Uusiautti, S., & Määttä, K. (2021). How to make the neighbourhood school a school for all? Finnish teachers' perceptions of educational reform for inclusion. *Journal of Research in Special Educational Needs*, 21(1), 35–46.
- Lancaster, J., & Bain, A. (2019). Designing university courses to improve preservice teachers' assistive technology self-efficacy for inclusive education. *Australian Journal of Teacher Education*, 44(8), 35–49. <https://doi.org/10.14221/ajte.2019v44n8.3>
- Messiou, K. (2017). Research in the field of inclusive education: Time for a rethink? *International Journal of Inclusive Education*, 21(2), 146–159. <https://doi.org/10.1080/13603116.2016.1223184>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Pratiwi, R., & Hartini, S. (2023). Implementasi individual education program di sekolah dasar inklusif Indonesia: Kajian kritis. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 19(2), 88–101.
- Rasmitadila, R., Aliyyah, R. R., Rachmadtullah, R., Samsudin, A., Syaodih, E., Nurtanto, M., & Tambunan, A. R. S. (2022). The perceptions of primary school teachers of online learning during the COVID-19 pandemic period: A case study in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 7(2), 90–109. <https://doi.org/10.29333/ejecs/388>
- Sari, D. P., & Purnama, A. (2022). Ketersediaan guru pendidikan khusus bersertifikat di sekolah dasar inklusif: Analisis situasi dan implikasi manajerial. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 28(1), 45–57.
- Setyawan, B., & Munawir, A. (2023). Evaluasi program pendidikan inklusif di Indonesia: Dari orientasi administratif menuju orientasi mutu. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(2), 112–125.
- Sharma, U., & Salend, S. J. (2019). Teaching assistants in inclusive classrooms: A systematic analysis of the international research. *Australian Journal of Teacher Education*, 41(8), 118–134.
- Subban, P., & Mahlo, D. (2021). My attitude, my responsibility: Exploring pre-service teacher attitudes and self-efficacy beliefs towards inclusive education between teacher preparation cohorts. *Teaching and Teacher Education*, 58, 829–837. <https://doi.org/10.1080/13603116.2016.1197322>
- Timmons, V., Wagner, M., & Warlick, K. (2020). Post-school outcomes of youth with disabilities: Findings from the national longitudinal transition study. *Exceptional Children*, 86(3), 253–271.
- UNESCO. (2020). *Global education monitoring report 2020: Inclusion and education: All means all*. UNESCO Publishing.
- Wahyuni, S., Suhartono, E., & Hidayah, N. (2021). Koordinasi manajerial sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di tingkat kecamatan: Studi kasus di Jawa Tengah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 28(2), 176–189.
- Walton, E. (2018). Decolonising (through) inclusive education? *Educational Research for Social Change*, 7(0), 31–45. <https://doi.org/10.17159/2221-4070/2018/v7i0a3>